

RENSTRA 2025-2029

DINAS SOSIAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029* dapat disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial selama lima tahun ke depan.

Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya berkenaan dengan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, dan prioritas nasional. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang diharapkan mampu menjawab permasalahan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dengan adanya Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, selanjutnya seluruh pelaksanaan program/kegiatan unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus mengacu kepada dokumen Renstra dimaksud. Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi tugas dan fungsi perangkat daerah, Renstra ini memberikan gambaran tentang kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu indikatif selama lima tahun kedepan. Harapannya semoga Renstra ini dapat menjadi acuan kerja yang efektif dan berkontribusi nyata dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 19 September 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	iii
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	 10
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
a. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	 10
b. Sumber Daya.....	15
c. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.....	18
d. Kelompok Sasaran Layanan.....	25
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	37
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	 41
3.1 Tujuan Renstra.....	41
3.2 Sasaran Renstra.....	42
3.3 Strategi Renstra.....	45
3.4 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran.....	47
 BAB IV PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN.....	 49
4.1 Rumusan Program Kegiatan dan Sub kegiatan.....	49
4.2 Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan.....	 64
4.3 Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pemerintah Daerah.....	 84
4.4 Indek Kinerja Utama (IKU).....	87
4.5 Indek Kinerja Kunci (IKK).....	90
 BAB V PENUTUP.....	 92

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon.....	15
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat pendidikan.....	15
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana.....	16
Tabel 2.4 Data PPKS Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	18
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	20
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	24
Tabel 2.7 Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.....	40
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	44
Tabel 3.2 Penahapan Renstra 2025-2029.....	46
Tabel 3.3 Arah Kebijakan.....	48
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Kab Tanjab Barat.....	51
Tabel 4.2 Rancangan Program/Kegiatan/Subkegiatan per Lokasi dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	65
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	85
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kab Tanjab Barat.....	89
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial Kab Tanjab Barat.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 menjadi instrumen penting dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan sosial daerah. Dokumen ini disusun sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, sekaligus sebagai penjabaran visi, misi, dan program strategis Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 sebagai sebuah Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029. Untuk mewujudkannya maka diperlukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan melalui pengembangan reformasi birokrasi sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima dan efisien, mengembangkan kinerja ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan kinerja sosial dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2025-2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan

strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan tahun 2025-2029. Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Renstra ini mengacu pada Visi Kepala Daerah, yaitu “Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI”, yang merupakan akronim dari: Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis, Mandiri, dan Inovatif. Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. BERKAH dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif;
2. BERKAH dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
3. BERKAH dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota

Penyusunan Renstra Dinas Sosial 2025–2029 juga merupakan bagian dari komitmen Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mewujudkan *good governance* melalui perencanaan berbasis data dan bukti. Perencanaan ini diharapkan mampu menyinergikan program pusat, provinsi, dan kabupaten serta memperkuat peran masyarakat dan lembaga sosial dalam pelaksanaan pembangunan sosial yang berkeadilan. Dengan demikian, penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 diharapkan mampu menjadi dokumen perencanaan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dan visioner. Renstra ini akan menjadi acuan bagi seluruh jajaran Dinas Sosial dalam mewujudkan visi daerah dan menjawab tantangan sosial secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan lansia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796;
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286;
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Nergara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan lembaran Negara Nomor 5235);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4451);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah keempat kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.
 21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3).
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 11).
 24. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai penjabaran dari RPJMD

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Barat Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menentukan prioritas program tahunan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada periode 2025 sampai dengan 2029.
2. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah dan memberikan pemahaman mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat jangka menengah 2025-2029.
3. Menjamin terciptanya sinkronisasi kebijakan dalam kerangka koordinasi, integrasi, dan sinergi kebijakan antar pelaku pembangunan (stakeholders).
4. Menyediakan indikator dan target kinerja untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah pada periode 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sosial disusun dari Bab I sampai Bab IV dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Merumuskan latar belakang penyusunan renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD

- 1.1. Landasan Hukum Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

- 1.2. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- 1.3. Sistematika Penulisan Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengumumkan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rentsra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengumumkan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rentsra Perangkat Daerah ini.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme)
- 2.1.2. SDM Perangkat Daerah Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih oprasional.

- 2.1.3. Asset/Modal Menyajikan sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki perangkat daerah sebagai sumberdaya dalam melaksanakan pelayanan kepada Masyarakat.
- 2.1.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Menyajikan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan (Tingkat capaian kinerja PD) 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2021 hingga tahun 2024, dan data lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis secara deskriptif dan diagnostic.
- 2.1.5. Kelompok sasaran layanan perangkat daerah Menjelaskan Gambaran kelompok sasaran yang menjadi targer pelayanan urusan bidang sosial
- 2.1.6. Mitra Perangkat Daerah dalam pelayanan Menjelaskan tentang organisasi pusat maupun daerah yang selalu berkolaborasi dalam menunjang peningkatan pelayanan perangkat daerah.
- 2.2. Permasalahan Perangkat Daerah Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta factor-faktor yang mempengaruhinya. Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan pada Bab II Rancangan Awal RPJMD tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD
- 2.3. Isu Strategis Perangkat Daerah Mengidentifikasi isu strategis sesuai Lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang mempengaruhi PD, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain RPJMN Tahun 2025-2029, Rensra K/L, laporan resmi dari Lembaga pemerintah/Lembaga luar negeri, laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD, serta potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Berisi perumusan tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029 yang diselaraskan dengan NSPK RPJMD tahun 2025-2029.
- 3.2. Strategi Renstra Perangkat Daerah Memberikan Gambaran terhadap rencana tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah/Upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Rentsra PD
- 3.3. Arah kebijakan Perangkat Daerah Menjelaskan terhadap arah kebijakan perangkat daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Menguraikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan pendanaan serta target dan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah
- 4.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Menggambarkan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 4.3 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Menggambarkan target keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan terhadap kesimpulan penting dan kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah di Bidang Sosial.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
2. Melaksanakan Kebijakan di Bidang Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
4. Melaksanakan administrasi di Bidang Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya uraian kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat masing-masing sebagai berikut

A. Kepala Dinas Sosial

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dibidang sosial.

Dalam melaksanakan tugas pokok kepala dinas mempunyai fungsi

- a. perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuanganeua meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);

- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

C. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial.

Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar dan prosedur, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak, lansia dan penyandang disabilitas;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang, orang terlantar, pekerja migran bermasalah dan orang dengan gangguan jiwa;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

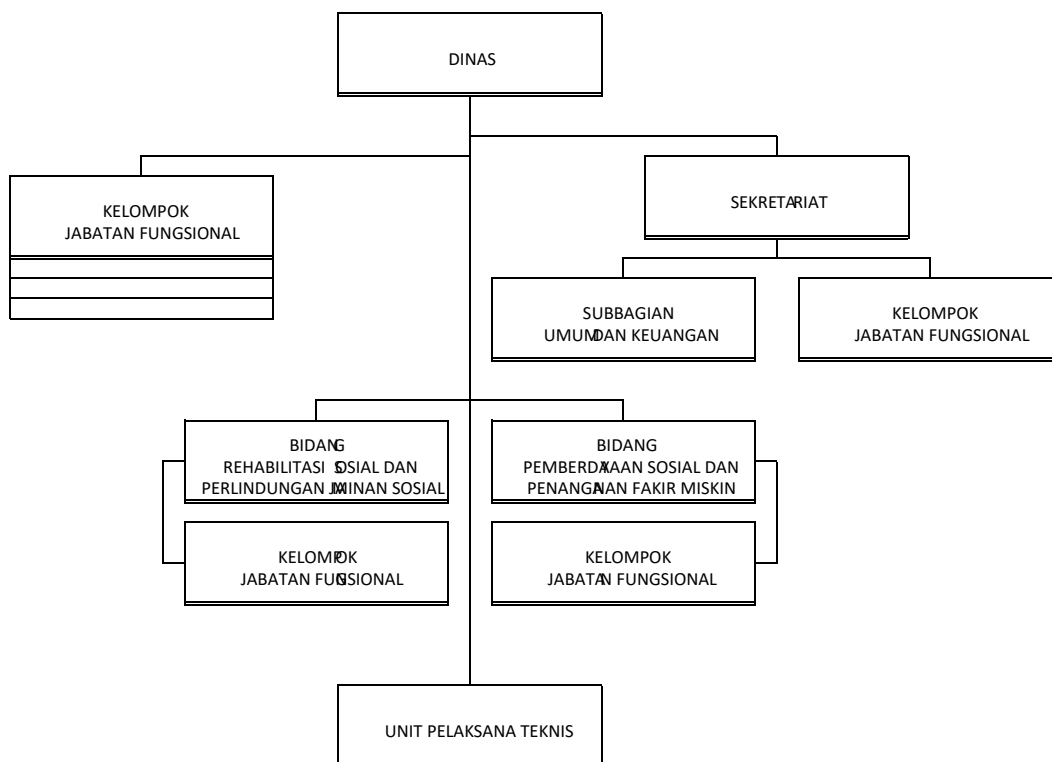
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan perorangan, pemberdayaan keluarga, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan sosial, pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial, serta penyelenggaraan penanganan orang terlantar/orang tidak mampu, mayat orang terlantar/orang tidak mampu;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi indentifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin, pemberdayaan sosial penanganan fakir miskin;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pendampingan, pemberdayaan dan bantuan stimulan fakir miskin; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris terdiri atas:
 - Subbagian Umum dan Keuangan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial terdiri
 - Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri
 - Kelompok Jabatan Fungsional
5. Unit Pelaksana Teknis.

Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagai berikut



b. Sumber Daya

- Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung aparatur sebanyak 36 orang dengan rincian ASN sebanyak 23 orang (PNS 19 Orang, PPPK 4 orang) dan TKK berjumlah 13 Orang, secara rinci disajikan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Jabatan	Esel II	Esel III	Esel IV	Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pertama	Staf / JFU	Jml
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	1	-	-	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	2	-	-	-	-	-	2
4	Kassubag /JFT	-	-	1	1	3	4	-	9
5	Staf Pelaksana /Fungsional Umum	-	-	-	-	-	-	10	10
6	TKK/Paruh waktu	-	-	-	-	-	-	-	13
Jumlah		1	3	1	1	3	4	8	36

Keterangan : Kondisi sampai dengan November 2025

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jml
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	1	-	-	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	2	-	-	-	-	2
4	Kassubag/JFT	-	9	-	-	-	-	9
5	Staf Pelaksana /Fungsional Umum Pelaksana/Fungsional Umum	-	5	-	5	-	-	10
6	TKK/Paruh waktu	-	6	-	7	-	-	13
Jumlah		2	22	-	12	-	-	36

Keterangan : Kondisi sampai dengan November 2025

- **Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi tanah, bangunan, inventaris/peralatan kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan pendukung lainnya.

Sarana dan Prasarana pada Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Sarana dan Prasara

NO	Spesifikasi Barang		Tahun Pembelian	Keadaan Barang	Jumlah
	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type			
1	4	5	9	12	13
1	Tanah Bangunan Rumah Negara	-	1993	Baik	1
2	Tanah Untuk Makam Pahlawan	-	2002	Baik	1
3	Mini Bus	Toyota/Avanza	2011	Baik	1
4	Mini Bus	Daihatsu/terios	2012	Baik	1
5	Mini Bus	Toyota/Rush 1.5	2014	Baik	1
6	Mini Bus	Daihatsu/Terios	2023	Baik	1
7	Sepeda Motor	Honda/Supra X 125	2010	Baik	2
8	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun	2010	kurang baik	1
9	Sepeda Motor	Honda / Vario	2011	kurang baik	2
10	Sepeda Motor	Honda / Spacy	2012	kurang baik	2
11	Sepeda Motor	Honda/ Mega Pro	2012	Baik	1
12	Sepeda Motor	Yamaha Lexi BPN A/AT	2024	Baik	2
13	Sepeda Motor	Yamaha/Frigo S	2025	Baik	3
14	Rak Besi	Rak besi 3 Tingkat	2024	Baik	8
16	CCTV - Camera Control Television	Paket AES-P2311	2023	Baik	
17	System	AES-P2311-7903		Baik	
19	LCD Projector/Infocus	VIEW SONIC/M1 MINI PLUS	2022	Baik	13
20	Teralis	-	2012	Baik	1
21	Teralis	-	2013	Baik	1
22	Teralis	-	2014	Baik	1
23	Meja Kerja Kayu	-	2009	Baik	3
24	Kursi Besi/Metal	Futura	2011	Baik	2
25	Kursi Besi/Metal	Richiwa	2017	Baik	9
26	Kursi Besi/Metal	-	2017	Baik	16
27	Tempat Tidur Besi	Crystaline	2017	Baik	2
28	Meja 1/2 Biro	-	1985	Baik	1
29	Meja 1/2 Biro	-	2007	Baik	2
30	Meja 1/2 Biro	-	2009	Baik	2
31	Meja 1/2 Biro	-	2014	Baik	5
32	Meja 1/2 Biro	-	2017	Baik	1
33	Meja 1/2 Biro	Olympic		Baik	13
34	Meja 1/2 Biro	ORBITREND	2022	Baik	4
35	Meja 1/2 Biro	PAKET	2023	Baik	1
38	Kursi Putar	-	2012	Kurang Baik	2
39	Kursi Putar	-	2017	Baik	2

40	Kursi Putar	-	2022	Baik	4
41	Kursi Putar	-	2024	Baik	4
42	Bangku Tunggu	-	2022	Baik	4
43	Kursi Lipat	-	2022	Baik	30
44	Meja Komputer	-	2011	Baik	1
45	Mesin Pemotong Rumput	TANIKA	2023	Baik	1
46	Mesin Pemotong Rumput	YAMAMOTO YMT 488D	2023	Baik	1
48	Lemari Es	SHARP	2023	Baik	1
49	A.C. Split	Sharp	2011	Baik	1
50	A.C. Split	Panasonic	2012	Kurang Baik	1
51	A.C. Split	-	2013	Kurang Baik	1
52	A.C. Split	SHARP / 1/2 PK	2022	Baik	4
53	A.C. Split	SHARP /AH-X18ZY	2024	Baik	6
55	Kipas Angin	MIYAKO	2023	Baik	4
56	Televisi	Sharp	2012	Baik	1
57	Televisi	-	2017	Baik	1
58	Sound System	BMB	2017	Baik	1
59	Sound System	BMB	2024	Baik	1
60	Wireless	VIOLENCE /BT3H151	2018	Baik	1
62	Microphone	SHURE / UT 25	2023	Baik	2
63	Tangga Aluminium	-	2013	Baik	1
64	Gordyin/Kray	-	2022	Baik	1
65	Alat Pembantu Kebakaran	ASGRAD / AS6P	2023	Baik	1
66	Meja Tamu Biasa	-	2017	Baik	1
67	Kursi Kerja Pejabat lainnya	AOBO /100-205-150N	2024	Baik	30
68	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	-	2014, 2017=2, 2019=1	Baik	11
69	Lemari Arsip Pejabat lainnya	KAYU/KACA	2023	Baik	2
70	Digital LED Running Text	-	2023	Baik	1
71	Layar Film/Projector	Infocus	2017	Baik	1
72	Camera Digital	Canon	2017	Baik	1
73	Personal Computer	LENOVO / IDEA	2025	Baik	3
74	P.C Unit	Lenovo	2017	Kurang Baik	2
75	P.C Unit	Lenovo /	2018	Baik	1
76		FOD8001HID			
77	Lap Top	Toshiba	2011, 2013,2017= 3	Baik	5
78	Lap Top	Asus / X44IU	2018	Baik	4
79	Lap Top	HP / Core i7	2019	Baik	2
80	Lap Top	ACER /Travelmate	2023	Baik	2
81	Tablet PC	Samsung /Galaxy Tab	2019	Baik	1
83	Tablet PC	Samsung Galaxy /	2019	Baik	1
84	Personal Komputer lainnya	LG	2014	Baik	1
85	Personal Komputer lainnya	HP / Core i5	2019	Baik	2
86	Printer (Peralatan Personal	EPSON /L3150wifi	2018	Kurang Baik	3
87	Printer (Peralatan Personal	EPSON / ECO TANK	2022	Baik	3
88	Printer (Peralatan Personal	BROTHER /OCP-T220	2024	Baik	4
89	Printer (Peralatan Personal	EPSON /ECOTANK	2025	Baik	2
90	Alat Tenis Meja	POWERSPIN 208	2023	Baik	1
91	Bangunan Gedung Kantor	-	2013	Baik	1
92	Bangunan Gedung Kantor Semi	-	2002	Baik	1
93	Permanen			Baik	
94	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	-	2012	Baik	1
95	Bangunan Gedung Kantor Lain-	-	2012	Baik	1

	lain				
96	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	-	2024	Baik	1
97	Bangunan Gudang Tertutup	-	2011	Baik	1
98	Permanen			Baik	
99	Rumah Negara Golongan I Tipe B	-	2017	Baik	1
100	Permanen			Baik	
101	Monomen/Bangunan Bersejarah	-	2008	Baik	1
102	Sumur Gali (SGL)	-	2011	Baik	1
103	Sumur Gali (SGL)	-	2013	Baik	1
104	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	-	2012	Baik	1

c. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Kinerja pelayanan Dinas Sosial yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangan Bidang Sosial antara lain memberikan Pelayanan dan Bantuan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Berikut Jenis Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tabel 2.4
Data PPKS Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	JENIS PPKS	JUMLAH
1	Anak balita terlantar	27 Orang
2	Anak terlantar	54 Orang
3	Anak berhadapan dengan hukum	18 Orang
4	Anak dengan kedisabilitas	147 Orang
5	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	1 Orang
6	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	3 Orang
7	Lanjut usia terlantar	937 Orang
8	Penyandang disabilitas	722 Orang
9	Tuna susila	9 Orang
10	Gelandangan	5 Orang
11	Pengemis	14 Orang
12	Pemulung	22 Orang
13	Kelompok minoritas	1 Orang
14	Bekas warga binaan lembaga permasyarakatan	52 Orang
15	Korban penyalahgunaan napza	26 Orang
16	Pekerja migran bermasalah sosial	2 Orang
17	Bencana alam	110 Orang
18	Bencana Sosial	15 Orang
19	Perempuan rawan sosial ekonomi	550 Orang
20	Fakir miskin	31.532 Orang
21	Keluarga bermasalah sosial psikologis	45 Orang
22	Komunitas adat terpencil	62 Orang

Sumber Data : Pendataan PMKS/PPKS Tahun 2018

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Sosial telah berupaya membantu mengurangi beban hidup masyarakat melalui pemberian bantuan dan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial. Untuk mencapai kinerja pelayanan terhadap PPKS ada 3 Sasaran Strategis dan indikator kinerja yang tertuang pada pada Renstra 2021-2026 ditambah 1 indikator pelayanan SPM Urusan Sosial.

Sasaran kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun pada Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesejahteraan PPKS dengan indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial dengan indikator Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah
3. Meningkatnya jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan Indikator Persentase Peningkatan jumlah dan peran PSKS
4. Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)

Adapun sasaran capaian kinerja pelayanan dinas sosial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Indikator Kinerja Utama	Target NSPK	Target IKK	Target SPM	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25,73 %	31%	63,86 %	64%		25,73%	31%	63,86 %	63,80%	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	
3	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			100%	44,47%	45,00 %	45,50 %	46,00 %	46,50 %	44,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %		98,94%	100%	98,90 %	97,83%	
4	Persentase Peningkatan jumlah dan peran PSKS				80%	82%	84%	85%	86%	82%	84%	85%	86%		102,50 %	102%	101,19 %	101,18 %	

Berdasarkan tabel diatas ada 4 indikator Utama Sasaran Pelayanan yang ingin dicapai, 2 diantaranya adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial atara lain :

1. Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (SPM)

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal mewajibkan target SPM Bidang Sosial 100%. Dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan anggaran daerah sehingga mutu layanan yang seharusnya didapat tidak dapat terakomodir secara keseluruhan, Namun Dinas Sosial tetap berupaya memberikan pelayanan yang lebih luas dengan cara bekerja sama dengan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi, Alyatama Jambi dan Pihak Swasta untuk memberikan pelayan terbaik kepada Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan dan pengemis diluar panti sosial hal ini dapat dilihat dari realisasi pencapaian target SPM dari Tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan

2. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Realisasi tingkat pencapaian 100% (SPM).

Semua korban bencana alam diberikan bantuan

3. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan realisasi pelayanan rata-rata mendekati pencapaian target.
4. Persentase Peningkatan jumlah dan peran PSKS dengan tingkat pencapaian 100 %

Pelayanan yang diberikan mencakup berbagai aspek penting berupa Bantuan penyediaan makanan, sandang, kesehatan, dan layanan sosial lainnya seperti alat bantu. Pada kelompok anak/orang terlantar, korban bencana alam dan sosial juga tertangani dengan baik. Namun masih terdapat kekurangan pada beberapa layanan seperti penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial bagi korban bencana.

Adapun jenis-jenis pelayanan sosial yang diselenggarakan Dinas Sosial Kabupaten Mojokert sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.1
Jenis-jenis Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	JENIS PELAYANAN	SASARAN
1	Pengurusan surat Keterangan Rekomendasi	Masyarakat yang masuk dalam DTKS/DTSEN
2	Pengurusan surat Rekomendasi Biakesmaskin	1.Orang dengan gangguan jiwa (odgj) yang belum memiliki nomor induk kependudukan 2. Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (ppks) yang belum memiliki nomor induk kependudukan 3. Terdampak bencana pada masa tanggap darurat dan/atau wabah pada kejadian luar biasa dalam skala provinsi 4.Telah menjadi peserta jkn, tetapi manfaat pelayanan kesehatan tidak ditanggung 5.Memiliki nomor induk kependudukan (nik), tetapi masih dalam proses integrasi ke dalam program jkn, sehingga manfaat pelayanan tidak diterima
4	Memfasilitasi untuk mendapatkan alat bantu	Penyandang Disabilitas Fisik
5	Penanganan Orang dengan T4/ OT	- Anak Terlantar - Lansia Terlantar - Disabilitas Terlantar - Orang Terlantar
6	Pendampingan Pengantaran ODGJ ke RSJ Jambi	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
7	Pendampingan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)	Anak Korban / Anak Saksi yang Berhadapan dengan Hukum
8	Pendampingan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)	- Orang dengan dugaan Tindak Pidana Ringan - Anak dengan dugaan Tindak Pidana Ringan
9	Pelayanan Adopsi Anak	Calon Orang Tua Anak (COTA)
10	Penyaluran Bantuan YAPI	- Anak Yatim , Anak Piatu, Anak Yatim Piatu
11	Penyaluran Bantuan Sosial ATENSI	- Kluster Disabilitas, Kluster Lanjut Usia Kluster Kelompok Rentan,Kluster Anak
12	Pelayanan calon klien pelatihan	- Calon Klien PSBR, RSBKW, RSBL
13	Reunifikasi / Pemulangan PPKS	- Orang Terlantar - Anak Terlantar

Sedangkan jenis-jenis bantuan sosial yang diselenggarakan Dinas Sosial, baik oleh pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh daerah maupun program bantuan sosial dari APBD daerah antara lain:

Tabel 2.4.2

Jenis-jenis Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Jenis Bantuan	Sumber Pendanaan	Sasaran	Kriteria
1	PKH	APBN	Fakir Miskin	1. Fakir iskin 2. Masuk DTKS
2	Sembako/BPNT	APBN	Fakir Miskin	1. Fakir iskin 2. Masuk DTKS
3	Bantuan Atensi	APBN	1. Anak 2. Lansia 3. Disabilitas	1. Fakir iskin 2. Masuk DTKS
4	Bantuan Atensi Yapi	APBN	1. Yatim 2. Piatu 3. Yatim Piatu	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS 3. Usia 1-18 Tahun 4. tidak menerima bansos PKH
6	Penyerahan Alat Bantu	APBD APBN Provinsi	Penyandang Disabilitas dan Lansia	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
8	Bantuan Sosial Permakanan Anak	APBN APBD Provinsi	FAKIR MISKIN USIA PRODUKTIF	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
9	Bantuan Sosial Permakanan Lanjut Usia	Apbd Provinsi	Fakir Miskin Usia Produktif	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
9	Program Keterampilan Kewirausahaan (Menjahit dan Tata Rias)	APBD PROVINSI	FAKIR MISKIN USIA PRODUKTIF	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS

Dalam pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial ini didukung oleh Program-program antara lain Program Pemberdayaan Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Penanganan Bencana. Program-program Pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Tanjng Jabung Barat selengkapnya terperinci pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Uraian / Program	Anggaran Pada Tahun 2021 – 2024				Realisasi Anggaran Pada Tahun 2021 – 2024				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun 2021 – 2024				Rata - Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.117.122.848	3.686.718.968	3.849.045.590	5.030.080.559	1.038.912.642	3.377.211.932	3.698.220.902	4.495.182.474	93	92	96	89	31	33
2	Program rehabilitasi Sosial	163.482.788	82.162.188	575.788.100	963.410.800	122.574.725	74.299.188	566.802.100	947.284.500	75	90	98	98	33	37
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	4.018.754.331	83.654.760	121.660.400	208.581.800	3.763.176.974	81.077.160	118.435.062	202.038.500	94	97	97	97	62	62
4	Program Penanganan Bencana	120.324.450	156.192.650	122.087.400	295.675.000	113.361.850	150.492.650	117.347.400	294.607.000	94	96	96	100	8	6
5	Program Pengelolaan Taman Makam	52.839.196	266.203.684	115.137.557	55.117.050	50.589.196	265.376.684	115.137.558	55.117.050	96	100	100	100	13	14
6	Program Pemberdayaan		336.973.800	380.938.700	133.168.800		319.974.000	369.534.305	133.168.800		95	97	100	373	373
	JUMLAH	5.472.523.613	4.611.906.050	5.164.657.747	6.686.034.009	5.088.615.387	4.268.431.614	4.985.477.327	6.127.398.324	90	95	97	97	87	88

Capaian Kinerja Pelayanan urusan Sosial bagi PPKS dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan, hal ini dikarenakan sejak tahun 2023 dilaksanakan program yang langsung menyentuh ke masyarakat kurang mampu, antara lain Pemberian Bantuan bagi masyarakat miskin ekstrem dan masyarakat miskin yang masuk dalam kategori desil 1 sampai dengan 5.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial mempunyai sasaran layanan sosial yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS/PPKS) yang terdiri dari:

- (1) Anak Terlantar adalah yaitu anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria:

- Berasal dari keluarga fakir miskin
- Anak yang mengalami perlakuan salah (kekerasan dalam rumah tangga)
- Ditelantarkan oleh orang tua/keluarga, atau
- Anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga
- Anak yang tidak pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dan tidak tamat

SMP

- Makan makanan pokok kurang dari 2 kali sehari
- Memiliki pakaian kurang dari 4 stel layak pakai
- Bila sakit tidak diobati
- Yatim, Piatu, Yatim piatu
- Tinggal bersama dengan bukan orang tua kandung yang miskin -

Anak yang berusia kurang dari 18 tahun dan bekerja.

- (2) Anak Balita Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam

keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria:

- Yatim piatu atau tidak dipelihara, ditinggalkan oleh orang tuanya pada orang lain, di tempat umum, rumah sakit, dan sebagainya.
- Tidak pernah/tidak cukup diberi ASI dan/atau susu tambahan/pengganti
- Makan makanan pokok tidak mencukupi
- Anak dititipkan atau ditinggal sendiri yang menimbulkan ketelantaran
- Apa bila sakit tidak mempunyai akses kesehatan modern (dibawa ke Puskesmas dan lain-lain) - Mengalami eksploitasi

(3) Anak Yang Mengalami Masalah Hukum adalah seorang anak yang berusia 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 1) yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; 2) yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria:

- Anak diindikasikan (terlaporkan di kepolisian) melakukan pelanggaran hukum;
- Anak yang mengikuti proses peradilan
- Anak yang berstatus diversi (pengalihan hak asuh anak kepada pihak lain atas keputusan pengadilan); dan
- Anak yang telah menjalani masa hukuman pidana atau sedang mengikuti pembinaan dalam bimbingan kemasyarakatan lapas; serta
- Anak yang menjadi korban perbuatan pelanggaran hukum
- Anak yang menjadi korban sengketa hukum akibat perceraian orang tua: perdata
- Anak yang karena suatu sebab menjadi saksi tindak pidana

- (4) Anak Jalanan adalah seorang anak yang berusia 5-18 tahun, dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/ atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria:

- Anak yang rentan bekerja di jalanan karena suatu sebab
- Anak yang melakukan aktivitas di jalanan
- Anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan
Jangka waktu di jalanan lebih dari 6 jam per hari dan dihitung untuk 1 bulan yang lalu

- (5) Anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria:

- Anak dengan disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara
- Anak dengan disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik
- Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda - Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.

- (6) Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan /atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

Kriteria:

- Anak dalam situasi darurat;
- Anak korban perdagangan;
- Anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental;
- Anak korban eksploitasi;

- Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
 - Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta
 - Anak yang terinfeksi HIV/AIDS
- (7) Lanjut Usia terlantar adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria:

- Tidak ada keluarga yang mengurusnya.
- Keterbatasan kemampuan keluarga yang mengurusnya,
- Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari
- Menderita minimal 1 jenis penyakit yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Lanjut usia yang hidup dalam keluarga fakir miskin

Untuk Lanjut Usia Terlantar terbagi menjadi 2 kriteria yaitu :

- LUT Potensial : yaitu lanjut usia terlantar yang masih mampu melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan barang dan/jasa.
 - LUT Tidak Potensial : yaitu lanjut usia terlantar yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain
- (8) Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.

Kriteria:

- Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari.
- Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari
- Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai
- Penyandang disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara

- Penyandang disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik
 - Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
- (9) Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Kriteria:

- Seseorang (laki-laki / perempuan) usia 18 – 59 tahun
 - Menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran (bordil), dan tempat terselubung (warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek).
- (10) Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Kriteria:

- Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun, tinggal di sembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar

Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas/liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya

- Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas, dll.
- (11) Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Kriteria:

- Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun
- Meminta-minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya

- Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan berpura-pura sakit, merintih, dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci, sumbangan untuk organisasi tertentu
 - Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaur dengan penduduk pada umumnya.
- (12) Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara mengais langsung dan pendaaurulang barang-barang bekas.
- Kriteria:
- Tidak mempunyai pekerjaan tetap atau mengais langsung dan mendaaurulang barang bekas, dll.
- (13) Kelompok Minoritas adalah individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay dan lesbian.
- Kriteria:
- tidak dominan dengan ciri khas, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk
 - Mempunyai perilaku menyimpang
- (14) Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
- Kriteria:
- Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun
Telah selesai atau segera keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana
 - Kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat
 - Sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap
 - Berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya

- (15) Orang Dengan HIV/AIDS adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Kriteria:

- Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun
- Telah terinfeksi HIV/AIDS

- (16) Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.

Kriteria:

- Seseorang (laki-laki / perempuan)
- Pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras, yang dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba
- Secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang
- tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya

- (17) Korban Trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. (Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang)

Kriteria:

- Mengalami tindak kekerasan
- Mengalami eksploitasi seksual
- Mengalami penelantaran
 - a. Mengalami pengusiran (deportasi)
- Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu

- (18) Korban Tindak Kekerasan adalah orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai

akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk

rasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria:

- Individu, kelompok maupun kesatuan masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan bentukbentuk tindak kekerasan lainnya
- berakibat terganggunya fungsi sosial

(19) Pekerja Migran Bermasalah Sosial adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial.

Kriteria:

- Calon pekerja migran,
- pekerja migran internal,
- pekerja migran lintas negara,
- eks pekerja migran
- yang mengalami masalah sosial dalam bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

(20) Korban Bencana Alam adalah adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Kriteria:

- Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

(21) Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria:

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

(22) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria:

- Perempuan berusia 18 – 59 tahun
- Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan.
- Menjadi pencari nafkah utama keluarga
- Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

(23) Fakir Miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.

Kriteria:

- Penghasilan rendah atau berada di bawah garis sangat miskin yang dapat diukur dari tingkat pengeluaran per orang per bulan berdasarkan standar BPS per wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

- Ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk miskin (seperti zakat/beras untuk orang miskin/santunan sosial)
- Keterbatasan kepemilikan pakaian untuk setiap anggota keluarga per tahun (hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap per orang per tahun).
- Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga sakit.
- Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya.
- Tidak memiliki harta (asset) yang dapat dimanfaatkan hasilnya atau dijual untuk membiayai kebutuhan hidup selama tiga bulan atau dua kali batas garis sangat miskin.
- Tinggal di rumah yang tidak layak huni.
- Sulit memperoleh air yang bersih

(24) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar Kriteria:

Suami atau istri sering tanpa saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi

- Suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga
- Hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi
- Kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi

(25) Keluarga Berumah Tidak Layak Huni adalah keluarga yang kondisi rumah dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.

Kriteria:

- Kondisi Rumah:
 - a. Luas lantai perkapita < 4>
 - b. Sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas
 - c. Tidak mempunyai akses MCK

- d. Bahan bangunan tidak permanen atau atap/dinding dari bambu, rumbia
 - e. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara
 - f. Tidak memiliki pembagian ruangan
 - g. Lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap
 - h. Letak rumah tidak teratur dan berdempeta
 - i. Kondisi rusak
 - Kondisi lingkungan:
 - a. Lingkungan kumuh dan becek
 - b. Saluran pembuangan air tidak memenuhi standar
 - c. Jalan setapak tidak teratur - Kondisi keluarga:
 - a. Kebanyakan keluarga miskin (di bawah garis kemiskinan)
 - b. Kesadaran untuk ikut serta memiliki dan memelihara lingkungan pada umumnya rendah (ikut bersih kampung, ikut kerja bakti, membuang sampah sembarangan di sungai)
- (26) Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan – kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.
- Kriteria:
- Berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen.
- Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan.
 - Pada umumnya terpencil secara geografis dan relative sulit dijangkau.
 - Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem.
 - Peralatan dan teknologinya sederhana.
 - Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi.
 - Terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina Dinas Sosial sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terdiri dari:

- (1) Penyuluh sosial yaitu tenaga yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai program-program kesejahteraan sosial dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial.
- (2) Pekerja Sosial Profesional yaitu tenaga profesional yang memiliki kompetensi dan sertifikasi dalam bidang pekerjaan sosial, berperan dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial dan pendampingan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- (3) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yaitu tenaga pendamping sosial yang ditugaskan di setiap kecamatan untuk membantu koordinasi dan pelaksanaan program-program sosial serta menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
- (4) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
- (5) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yaitu relawan sosial dari masyarakat yang membantu pelaksanaan program kesejahteraan sosial di tingkat desa/kelurahan, termasuk dalam pendataan dan fasilitasi bantuan sosial.
- (6) Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yaitu Relawan yang terlatih dalam penanggulangan bencana, berperan dalam kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi pascabencana di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (7) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yaitu organisasi sosial yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, seperti panti asuhan, panti jompo, dan lembaga rehabilitasi sosial lainnya.
- (8) Karang Taruna yaitu organisasi kepemudaan di tingkat desa/kelurahan yang berperan dalam pemberdayaan sosial ekonomi pemuda dan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kewirausahaan.
- (9) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yaitu lembaga yang memberikan layanan konsultasi dan mediasi untuk mengatasi

permasalahan keluarga, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan konflik keluarga.

- (10) Keluarga Pioner yaitu keluarga yang menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai kesejahteraan sosial dan menjadi agen perubahan lingkungan sekitarnya.
- (11) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yaitu kelompok masyarakat yang secara swadaya dan partisipatif menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
- (12) Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) yaitu perempuan yang aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi penggerak dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial di masyarakat.
- (13) Dunia Usaha yaitu perusahaan dan pelaku usaha yang berkontribusi dalam program kesejahteraan sosial melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan kemitraan dengan pemerintah daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam perkembangannya, telah menghadapi berbagai dinamika sosial yang tumbuh di masyarakat. Melalui analisis mendalam, penyusunan rencana jangka menengah perlu mempertimbangkan isu maupun permasalahan yang kerap terjadi di wilayah sebagai rujukan dalam menyusun Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan mengetahui permasalahan yang kerap muncul diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial dimasa datang.

Perumusan Permasalahan bertujuan untuk menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Permasalahan utama yang masih dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain:

1. Permasalahan validitas dan akurasi data penerima manfaat. Meskipun upaya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terus dilakukan, masih banyak ditemukan ketidaksesuaian antara data dengan kondisi riil di lapangan. Akibatnya, program bantuan sosial sering tidak tepat sasaran dan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
2. Rendahnya partisipasi dan literasi masyarakat terhadap program-program Dinas Sosial menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami prosedur, kriteria, atau manfaat dari layanan sosial yang tersedia, sehingga mengakibatkan minimnya pelaporan kasus, kurangnya inisiatif mandiri, dan rendahnya efektivitas pemberdayaan.
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang profesional dan kurangnya tenaga Fungsional di Bidang Sosial.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau

keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Untuk lebih jelasnya, identifikasi permasalahan dan isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Tabel 2.7. di bawah ini.

Tabel 2.7

Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Dinas Sosial	Permasalahan Dinas Sosial	Isu Kllhs Relevan Dengan Dinas Sosial	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Sosial			Isu Strategis Dinas Sosial
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belum optimalnya pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTSEN untuk penanganan keluarga fakir miskin	Data DTSEN belum Valid	Masih terdapat pemberian bansos yang belum tepat sasaran	Capaian target SDG's masih menetapkan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas	Isu kemiskinan masih menjadi program prioritas melalui berbagai macam Bantuan (PKH, BPNT, JKN, dll)	Masih tingginya disparitas antara pertumbuhan ekonomi dengan angka kemiskinan	DTSEN belum menggambarkan jumlah PPKS sesungguhnya
Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai kewenangan kabupaten	Rawan kolusi dan nepotisme dalam pengusulan DTSEN	Masih terdapat Bansos yang belum tepat sasaran		Kenaikan angka inflasi nasional yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan angka kemiskinan	Masih tingginya kemiskinan di Tanjab Barat terutama di perkotaan yang berimplikasi pada berkembangnya PPKS jalanan.	PPKS belum tertangani dengan baik

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN RENSTRA

Visi dan misi adalah dua komponen penting dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Visi adalah gambaran ideal atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau pemerintahan di masa depan. Misi adalah langkah-langkah strategis atau cara-cara yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Misi lebih operasional dan konkret, karena biasanya dijabarkan dalam bentuk program, kebijakan, atau kegiatan nyata. Visi bersifat inspiratif dan memberikan arah umum dari semua kebijakan dan program yang dijalankan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Baik tujuan maupun sasaran, keduanya merupakan bagian penting dari dokumen perencanaan untuk mengarahkan kinerja dan pelaksanaan program secara sistematis dan terukur dalam periode tertentu.

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 telah menetapkan Visi dan Misi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai berikut:

VISI	Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis, Mandiri dan Inovatif)
MISI 1	Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif
MISI 2	Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
MISI 3	Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan

Berdasarkan ketiga misi tersebut di atas, Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga Menetapkan Tujuan dan sasaran pada RPJMD 2025-2029 sebagai berikut :

Misi	Tujuan	Sasaran
1	2) Mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, inovatif dan memiliki daya tahan sosial	4) Meningkatnya cakupan perlindungan Sosial
2	3) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif	7) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah 8) Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
3	4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	13) Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran

3.2 SASARAN RENSTRA

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah

1. Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial
2. Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat miskin dan rentan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya.

Indikator-indikator sasaran yang dimaksud disajikan pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK Dan Sasaran PJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahunan						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4) 1`1	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
- Menurunnya Tingkat kemiskinan dan Pengangguran - Meningkatnya cakupan perlindungan sosial - Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah - Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		Indek Kesejahteraan Sosial	50,00 - 55,50	55,51 - 56,00	56,01 - 56,50	56,51 - 57,50	57,01 - 57,50	57,01 - 57,50	
		Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menerima Bantuan Rehabilitasi Sosial	25 %	25 %	26 %	26 %	27 %	27 %	
		Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat miskin dan rentan	Persentase Keluarga Miskin dan rentan yang menerima Bantuan tepat sasaran	48 %	49 %	50 %	51 %	52 %	53 %	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah	Nilai AKIP OPD Nilai IKM	74 82	75 83	76 84	77 85	78 86	79 87	

3.3. Strategi Renstra

Strategi Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Dengan mempertimbang kondisi perangkat daerah dan kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas diperlukan penahapan strategi dalam renstra perangkat daerah, sehingga adanya rasionalisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun strategi renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Penahapan RENSTRA 2025 -2029

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2025	2026	2027	2028	2029
5	5	5	5	5
- Verifikasi dan validasi DTKS/DTSEN dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui bantuan sosial tepat sasaran	- Penguatan Basis Data Sosial melalui pemutakhiran DTSEN dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui bantuan sosial tepat sasaran	- Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Rentan melalui pelatihan dan Penguatan kelembagaan sosial dan sinergi program sosial	- Integrasi layanan sosial dan ekonomi digital melalui pengembangan sistem informasi layanan sosial berbasis digital dan pemanfaatan platform digital	- Evaluasi menyeluruh terhadap capaian perencanaan lima tahunan dan penyusunan roadmap Keberlanjutan program sosial periode berikutnya

3.4 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), diperlukan suatu tahapan pembangunan yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Penahapan pembangunan ini merupakan bentuk konkret dari proses perencanaan jangka menengah yang memecah target-target strategis ke dalam prioritas pembangunan tahunan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih fokus dan terarah sesuai dengan kapasitas fiskal, kesiapan kelembagaan, serta dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang.

Setiap tahapan pembangunan disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan logis antara program dan kegiatan pada tahun berjalan dengan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode RENSTRA. Dengan demikian, proses pembangunan tidak dilakukan secara sporadis atau parsial, tetapi mengikuti alur kebijakan yang berkesinambungan dan integratif. Tahapan ini juga memberikan ruang untuk penyesuaian secara adaptif terhadap perubahan regulasi, kebijakan nasional/daerah, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dapat mempengaruhi pelaksanaan rencana.

Selain itu, penahapan pembangunan juga berfungsi sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan sebagai acuan dalam penganggaran berbasis kinerja. Dengan menentukan prioritas tahunan yang jelas dan realistis, instansi atau perangkat daerah dapat lebih mudah memantau dan mengevaluasi capaian kinerja setiap tahun, sekaligus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap proses pelaksanaan program dan kegiatan. Melalui penahapan yang tepat, diharapkan seluruh proses pembangunan dapat mendorong pencapaian sasaran strategis secara efektif dan efisien, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Adapun tahapan tersebut sebagaimana tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Araah Kebijakan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN PD	KET
1	2	3	4	5
1	Pemutahiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional	- Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala dan partisipatif	- Melakukan Ferifikasi DTSEN setiap tahun untuk mengecek kebenaran data (nama, alamat, kondisi sosial sudah benar. Hal ini bertujuan agar DTSEN Tetap mutakhir karna kondisi rumah tangga dapat berubah (menjadi miskin, tidak miskin, pindah dll)	
		- Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan data kemiskinan dan kerentanan sosial	- Melakukan Konsultasi dan Koordinasi lintas sektor dengan melibatkan OPD/lembaga yang ada relevansinya dengan DTSEN seperti BPS, PMD, Camat, Lurah/Kades dan RT	
		- Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan analisis data kesejahteraan sosial	- DTKS/DTSEN yang sudah diferifikasi selanjutnya akan dilakukan pengumpulan dan pembersihan Data dan memastikan data tidak ganda, megidentifikasi keluarga miskin /rentan menentukan apakah yang bersangkutan masih berhak untuk menerima bantuan Sosial. Diharapkan DTSEN sebagai Data Tunggal dalam PrograM-program pengentasan kemiskinan.	
		- Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data sosial	- Melakukan pertemuan, sosialisasi dan bintek kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ferifikasi DTSEN sebagai upaya untuk menguatkan kemampuan dalam melakukan pengumpulan, pengolahan dan manajemen serta analisis dan interpretasi Data, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat, valid dan tepat sasaran, dan dapat di pergunakan untuk perencanaan, evaluasi dan pengambilan kebijakan.	
2	Perluasan Jangkauan Bansos bagi masyarakat miskin dan rentan	- Peningkatan cakupan penerima manfaat program bantuan sosial daerah dan pusat	- Dinas Sosial berupaya memperluas jumlah dan jangkauan KPM yang layak menerima bansos sehingga kelompok miskin, rentan dan terdampak dapat teridentifikasi masuk ke dalam basis data dan mendapat bantuan sesuai kebutuhan.	
		- Pengembangan skema bantuan sosial berbasis kebutuhan lokal	- Dinas Sosial membangun skema bantuan sosial berbasis kebutuhan lokal melalui pendekatan penyaluran bansos yang disesuaikan dengan kondisi, potensi dan kebutuhan spesifik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	

BAB 4

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, seluruh dokumen perencanaan disusun secara berjenjang dan terintegrasi, dengan mengacu pada prinsip result-based planning atau perencanaan berbasis hasil. Pendekatan ini bertujuan agar setiap intervensi pembangunan yang dilakukan oleh perangkat daerah benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Melalui pendekatan ini pula, setiap perangkat daerah memiliki peta jalan yang jelas dari level strategis hingga operasional.

Sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJMD menjadi dasar utama dalam perumusan tujuan perangkat daerah pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Tujuan PD merupakan penjabaran dari sasaran RPJMD yang telah disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing OPD. Dengan demikian, keterkaitan vertikal antara perencanaan daerah dan perencanaan perangkat daerah tetap terjaga dan dapat diukur secara sistematis.

Selanjutnya, tujuan PD dijabarkan lagi menjadi sasaran perangkat daerah, yang memiliki indikator kinerja berupa outcome. Outcome merupakan hasil antara (intermediate result) yang mencerminkan dampak langsung dari program dan kegiatan yang dilaksanakan. Untuk memastikan ketercapaian outcome, maka disusunlah program-program yang bersifat strategis dan relevan dengan sasaran perangkat daerah. Program ini kemudian dijabarkan ke dalam output, yaitu hasil konkret yang dapat dicapai dalam jangka pendek melalui kegiatan dan sub-kegiatan.

Kegiatan dan sub-kegiatan merupakan komponen pelaksana dari program, dan bersifat teknis operasional. Setiap kegiatan harus dapat mendukung capaian output secara nyata, baik berupa produk fisik, layanan, dokumen, atau capaian kinerja lainnya. Dengan demikian, terdapat keterkaitan yang utuh antara sasaran RPJMD, tujuan Perangkat Daerah, sasaran Perangkat Daerah (outcome) yang didukung program dan output didukung kegiatan, sehingga seluruh proses perencanaan pembangunan berjalan secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Rumusan program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun berdasarkan Kemendagri 900.1-2850 Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

TABEL 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT							
- Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran - Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Menurunnya angka kemiskinan dan meningkan kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menerima bantuan rehabilitasi sosial (%)		
			Meningkatnya rehabilitasi sosial		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	

					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan	1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan	1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan	1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan	1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	

					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan	1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan		
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan	1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis		
					Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS	
						Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS	
						Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan	1.06.04.2.02.0013 - Pemberian Layanan Rujukan	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi	1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial		Persentase Keluarga Miskin dan rentan yang menerima bantuan tepat			
					Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
				Terlaksananya Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	Persentase pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan	1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		

				Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01.0002 - Rujukan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang	1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang	1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Partisipasi Sumber Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial		Persentase Potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam PPKS		
					Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Terlaksananya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Jumlah Lokasi yang telah dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT Kewenangan	1.06.02.2.01 - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	
					Jumlah Lokasi yang telah dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT Kewenangan	1.06.02.2.01.0005 - Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT	
				Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti (Laporan)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan	

					Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	
					Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang	1.06.02.2.03.0010 - Fasilitas Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional,	
					Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti (Laporan)	1.06.02.2.03.0016 - Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat daerah			Nilai AKIP OPD (*)		
					Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)		
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
					Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	

				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan dan jumlah yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai dengan jumlah dan periode	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.06.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.06.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya laporan barang perangkat daerah sesuai dengan jumlah dan periode pelaporan yang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	1.06.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.06.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Persentase pegawai yang mendapatkan pakaian dinas dan mengikuti pelatihan/bimtek dari total	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.06.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.06.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Perundangan	1.06.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah secara tertib dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang	1.06.01.2.06.0007 - Penyediaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.06.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya data dan laporan jumlah BMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.06.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.06.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1.06.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	
				Tersusunnya laporan pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah SKPD sebagai bentuk dukungan terhadap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

				Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah secara rutin dan berkelanjutan guna menjamin keberfungsian	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1.06.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	

					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.06.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan		Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
				Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional	1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional	1.06.07.2.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	1.06.07.2.01.0003 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana			Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhn Dasar Pada Saat dan Setelah		
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhn Dasar Pada Saat dan Setelah	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	

					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca	1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan	1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	

4.2 Rencana Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat merumuskan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan secara terarah, konsisten, dan berbasis pada hasil. Penyusunan ini dilakukan dengan pendekatan yang mengedepankan keterkaitan logis antara tujuan, sasaran, outcome, output, dan input, guna memastikan bahwa pelaksanaan program mampu memberikan dampak nyata terhadap pencapaian prioritas pembangunan.

Setiap program dan kegiatan disusun mengacu pada dokumen perencanaan strategis dan tahunan, seperti Renstra OPD dan Renja, serta mengikuti klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang ditetapkan melalui Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran melalui Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025. Penyelarasan ini dimaksudkan untuk menjamin keseragaman sistem informasi perencanaan dan penganggaran, serta mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Rencana program dan kegiatan juga disusun secara proporsional berdasarkan kemampuan keuangan daerah, dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan prioritas pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, tetapi juga menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dengan demikian, keseluruhan rencana program/kegiatan dan sub kegiatan beserta pendanaannya diharapkan mampu Mengatasi Permasalahanm Sosial yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Perencanaan ini menjadi instrumen penting dalam pencapaian target kinerja OPD secara terukur dan mendukung perwujudan visi pembangunan daerah secara menyeluruh.

Adapun Rencana Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					25.257.000.000,00		25.684.000.000,00		26.036.000.000,00		26.443.000.000,00		26.554.000.000,00				
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.985.000.000,00		13.985.000.000,00		13.985.000.000,00		13.985.000.000,00		13.985.000.000,00				
Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	100	100	100	13.985.000.000,00	100	13.985.000.000,00	100	13.985.000.000,00	100	13.985.000.000,00	100	13.985.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG			
	Pemenuhan	100	100	100		100		100		100		100					
1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan					350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00				
Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan dan jumlah yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan program dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	3	3	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	7		7		7		7		7					
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	1		1		1		1		1					
1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00				
1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	3	3	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00				
1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG		

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N			
			2025	2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00						
Keuangan Perangkat					3.430.000.000,00		3.430.000.000,00		3.430.000.000,00		3.430.000.000,00		3.430.000.000,00						
Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai dengan jumlah dan periode pelaporan yang telah ditetapkan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	1	1	3.430.000.000,00		3.430.000.000,00	1	3.430.000.000,00	1	3.430.000.000,00	1	3.430.000.000,00						
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20	20	25				25				25				25			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	14	14	14				14				14				14			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	10	10	10				10				10			10				
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT				
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20	20	25	3.000.000.000,00	25	3.000.000.000,00	25	3.000.000.000,00	25	3.000.000.000,00	25	3.000.000.000,00						
1.06.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT				
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	10	10	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00						
1.06.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT				
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00						
1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT				

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	14	14	14	30.000.000,00	14	30.000.000,00	14	30.000.000,00	14	30.000.000,00	14	30.000.000,00			
1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Tersusunnya laporan barang perangkat daerah sesuai dengan jumlah dan periode pelaporan yang telah ditetapkan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	12				12		12		12				
1.06.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00			
1.06.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00			
Persentase pegawai yang mendapatkan pakaian dinas dan mengikuti pelatihan/bimtek dari total	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	12	12	480.000.000,00	12	480.000.000,00	12	480.000.000,00	12	480.000.000,00	12	480.000.000,00			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6	6	6				6		6		6				
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6	6	6				6		6		6				
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4	4	4				4		4		4				

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4	4	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00			
1.06.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	12	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00			
1.06.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6	6	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00			
1.06.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	6	6	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00			
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.265.000.000,00		1.265.000.000,00		1.265.000.000,00		1.265.000.000,00		1.265.000.000,00			
Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah secara tertib dan berkesinambungan sesuai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	300	300	300	1.265.000.000,00	300	1.265.000.000,00	300	1.265.000.000,00	300	1.265.000.000,00	300	1.265.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	20	20	20		20		20		20		20				
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	10	10	10		10		10		10		10				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	17	17	17		17		17		17		17				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	12		12		12		12		12				

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5	5		5		5		5		5				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15	15	15		15		15		15						
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	5	5	5		5		5		5						
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00			
1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15	15	15	70.000.000,00	15	70.000.000,00	15	70.000.000,00	15	70.000.000,00	15	70.000.000,00			
1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	5	5	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00			
1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00			
1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	12	90.000.000,00	12	90.000.000,00	12	90.000.000,00	12	90.000.000,00	12	90.000.000,00			
1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	20	20	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00			

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.06.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	17	17	17	200.000.000,00	17	200.000.000,00	17	200.000.000,00	17	200.000.000,00	17	200.000.000,00			
1.06.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	10	10	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00			
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	300	300	300	700.000.000,00	300	700.000.000,00	300	700.000.000,00	300	700.000.000,00	300	700.000.000,00			
1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					4.200.000.000,00		4.200.000.000,00		4.200.000.000,00		4.200.000.000,00		4.200.000.000,00			
Tersedianya data dan laporan jumlah BMD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	5	5	5	4.200.000.000,00	5	4.200.000.000,00	5	4.200.000.000,00	5	4.200.000.000,00	5	4.200.000.000,00			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	5	5	5		5		5		5						
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1		1		1		1						
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	4	4	4		4		4		4						
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	8	8	8		8		8		8						
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	12	12		12		12		12						
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10	17		17		17		17						
	1.06.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							600.000.000,00				600.000.000,00			600.000.000,00	

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	5	5	5	600.000.000,00	5	600.000.000,00	5	600.000.000,00	5	600.000.000,00	5	600.000.000,00			
1.06.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	5	5	5	600.000.000,00	5	600.000.000,00	5	600.000.000,00	5	600.000.000,00	5	600.000.000,00			
1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	8	8	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00			
1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	12	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00			
1.06.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00			
1.06.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10	17	200.000.000,00	17	200.000.000,00	17	200.000.000,00	17	200.000.000,00	17	200.000.000,00			
1.06.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	4	4	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00			
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					590.000.000,00		590.000.000,00		590.000.000,00		590.000.000,00		590.000.000,00			

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersusunnya laporan pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah SKPD sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi perangkat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1	590.000.000,00	1	590.000.000,00	1	590.000.000,00	1	590.000.000,00	1	590.000.000,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8	8	8												
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	2	2												
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12												
1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00			KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00			
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	2	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00			
1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00			
1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8	8	8	350.000.000,00	8	350.000.000,00	8	350.000.000,00	8	350.000.000,00	8	350.000.000,00			

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N		
			2025	2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					3.570.000.000,00		3.570.000.000,00		3.570.000.000,00		3.570.000.000,00		3.570.000.000,00					
Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah secara rutin dan berkelanjutan guna menjamin keberfungsian aset dalam mendukung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24	24	24	3.570.000.000,00	24	3.570.000.000,00	24	3.570.000.000,00	24	3.570.000.000,00	24	3.570.000.000,00					
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	25	25		25		25		25		25						
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10	10	10		10		10		10		10						
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	24	24		24		24		24		24						
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita	10	10	10		10		10		10		10						
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita	10	10	10		10		10		10		10						
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita	4	4	4		4		4		4		4						
	si (Unit)																	
	1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan							250.000.000,00				250.000.000,00				250.000.000,00		250.000.000,00
Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	24	24	250.000.000,00	24	250.000.000,00	24	250.000.000,00	24	250.000.000,00	24	250.000.000,00					
1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24	24	24	250.000.000,00	24	250.000.000,00	24	250.000.000,00	24	250.000.000,00	24	250.000.000,00					

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.06.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10	10	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00			
1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	25	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00			
1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si (Unit)	4	4	4	2.000.000.000,00	4	2.000.000.000,00	4	2.000.000.000,00	4	2.000.000.000,00	4	2.000.000.000,00			
1.06.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau					500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si (Unit)	10	10	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00			
1.06.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita	10	10	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00			
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					2.095.000.000,00		2.095.000.000,00		2.095.000.000,00		2.095.000.000,00		2.095.000.000,00			
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	81	82	83	2.095.000.000,00	87	2.095.000.000,00	89	2.095.000.000,00	92	2.095.000.000,00	93	2.095.000.000,00	1.06.0.000.0.00.01.0 000 - DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
1.06.02.2.01 - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00			
Terlaksananya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Jumlah Lokasi yang telah dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial	2	2	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00			

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.06.02.2.01.0005 - Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT	Jumlah Lokasi yang telah dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial	2	2	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00			
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan					1.895.000.000,00		1.895.000.000,00		1.895.000.000,00		1.895.000.000,00		1.895.000.000,00			
Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan	24	24	24	1.895.000.000,00	24	1.895.000.000,00	24	1.895.000.000,00	24	1.895.000.000,00	28	1.895.000.000,00			
	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	1	1	1		1		1		1						
	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	500	500	500		500		500		500						
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	4	4	4		4		4		4						
1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan					1.395.000.000,00		1.395.000.000,00		1.395.000.000,00		1.395.000.000,00		1.395.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	500	500	500	1.395.000.000,00	500	1.395.000.000,00	500	1.395.000.000,00	500	1.395.000.000,00	500	1.395.000.000,00			
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan					400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	4	4	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00			

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.06.02.2.03.0010 - Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan	24	24	24	50.000.000,00	24	50.000.000,00	24	50.000.000,00	24	50.000.000,00	28	50.000.000,00			
1.06.02.2.03.0016 - Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	1	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					4.411.000.000,00		4.602.000.000,00		4.763.000.000,00		4.984.000.000,00		4.984.000.000,00			
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi	49,37	49,50	50	4.411.000.000,00	50,5	4.602.000.000,00	60	4.763.000.000,00	60,10	4.984.000.000,00	60,20	4.984.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di					4.275.000.000,00		4.460.000.000,00		4.615.000.000,00		4.830.000.000,00		4.830.000.000,00			
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan	60	60	60	4.275.000.000,00	60	4.460.000.000,00	60	4.615.000.000,00	60	4.830.000.000,00	60	4.830.000.000,00			
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan	100	100	100		100		100		100		100				
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan	54	54	64		74		84		94		94				
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permaknaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan	932	932	1.022		1.112		1.132		1.222		1.222				

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan	200	200	220		240		260		280		280				
	Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan	100	100	100		100		100		100		100				
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	100		100		100		100		100				
	Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan	50	50	50		50		50		50		50				
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan					1.710.000.000,00		1.870.000.000,00		2.000.000.000,00		2.190.000.000,00		2.190.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan	932	932	1.022	1.710.000.000,00	1.112	1.870.000.000,00	1.132	2.000.000.000,00	1.222	2.190.000.000,00	1.222	2.190.000.000,00			
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang					1.110.000.000,00		1.120.000.000,00		1.130.000.000,00		1.140.000.000,00		1.140.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan	200	200	220	1.110.000.000,00	240	1.120.000.000,00	260	1.130.000.000,00	280	1.140.000.000,00	280	1.140.000.000,00			
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu					800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan	60	60	60	800.000.000,00	60	800.000.000,00	60	800.000.000,00	60	800.000.000,00	60	800.000.000,00			
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00			
1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan	Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan	50	50	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00			
1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan					95.000.000,00		110.000.000,00		125.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan	54	54	64	95.000.000,00	74	110.000.000,00	84	125.000.000,00	94	140.000.000,00	94	140.000.000,00			
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan					60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan	100	100	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00			
1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Peneemis Kewenangan					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terpenuhi Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan	100	100	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00			
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti					136.000.000,00		142.000.000,00		148.000.000,00		154.000.000,00		154.000.000,00			
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	58	58	68	136.000.000,00	78	142.000.000,00	88	148.000.000,00	98	154.000.000,00	98	154.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	13	13	13		13		13		13		13				
1.06.04.2.02.0013 - Pemberian Layanan Rujukan					36.000.000,00		42.000.000,00		48.000.000,00		54.000.000,00		54.000.000,00			KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan	58	58	68	36.000.000,00	78	42.000.000,00	88	48.000.000,00	98	54.000.000,00	98	54.000.000,00			
1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	13	13	13	100.000.000,00	13	100.000.000,00	13	100.000.000,00	13	100.000.000,00	13	100.000.000,00			
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					2.605.000.000,00		2.650.000.000,00		2.650.000.000,00		2.650.000.000,00		2.650.000.000,00			
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100	100	100	2.605.000.000,00	100	2.650.000.000,00	100	2.650.000.000,00	100	2.650.000.000,00	100	2.650.000.000,00	1.06.0.000.001.0 000 - DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG		
	Persentase pengelolaan dan pendataan data fakir	90	100	100		100		100		100						
Pemeliharaan Anak-Anak					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00			

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N			
			2025	2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
Terlaksananya Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan	10	10	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT				
	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan	60	60	60		60		60		60									
1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar					170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00						
Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan	60	60	60	170.000.000,00	60	170.000.000,00	60	170.000.000,00	60	170.000.000,00	60	170.000.000,00						
1.06.05.2.01.0002 - Rujukan Anak-Anak Terlantar					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT				
Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan	10	10	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00						
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					2.405.000.000,00		2.450.000.000,00		2.450.000.000,00		2.450.000.000,00		2.450.000.000,00						
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	100	2.405.000.000,00	100	2.450.000.000,00	100	2.450.000.000,00	100	2.450.000.000,00	100	2.450.000.000,00						
	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan	13.142	14.401	14.000		13.800		13.600		13.400		13.200							
	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	10.000	10.000	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000							
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					260.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT				
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	10.000	10.000	10.000	260.000.000,00	10.000	260.000.000,00	10.000	260.000.000,00	10.000	260.000.000,00	10.000	260.000.000,00						
1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga					1.005.000.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT				

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	100	1.005.000.000,00	100	1.250.000.000,00	100	1.250.000.000,00	100	1.250.000.000,00	100	1.250.000.000,00			
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					1.140.000.000,00		940.000.000,00		940.000.000,00		940.000.000,00		940.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan	13.142	14.401	14.000	1.140.000.000,00	13.800	940.000.000,00	13.600	940.000.000,00	13.400	940.000.000,00	13.200	940.000.000,00			
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.845.000.000,00		1.925.000.000,00		2.005.000.000,00		2.080.000.000,00		2.080.000.000,00			
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat	100	100	100	1.845.000.000,00	100	1.925.000.000,00	100	2.005.000.000,00	100	2.080.000.000,00	100	2.080.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0 000 - DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial					1.665.000.000,00		1.730.000.000,00		1.790.000.000,00		1.850.000.000,00		1.850.000.000,00			
Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan	672	672	739	1.665.000.000,00	806	1.730.000.000,00	873	1.790.000.000,00	940	1.850.000.000,00	940	1.850.000.000,00			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	672	672	739		806		882		949		949				
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan					960.000.000,00		960.000.000,00		1.020.000.000,00		1.020.000.000,00		1.020.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	672	672	739	960.000.000,00	806	960.000.000,00	882	1.020.000.000,00	949	1.020.000.000,00	949	1.020.000.000,00			
1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang					705.000.000,00		770.000.000,00		770.000.000,00		830.000.000,00		830.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan	672	672	739	705.000.000,00	806	770.000.000,00	873	770.000.000,00	940	830.000.000,00	940	830.000.000,00			
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					180.000.000,00		195.000.000,00		215.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00			
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	1	1	2	180.000.000,00	3	195.000.000,00	4	215.000.000,00	5	230.000.000,00	5	230.000.000,00			
	Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	77	77	84		91		98		105		105				
1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana					90.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	1	1	2	90.000.000,00	3	100.000.000,00	4	110.000.000,00	5	120.000.000,00	5	120.000.000,00			
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana					90.000.000,00		95.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	77	77	84	90.000.000,00	91	95.000.000,00	98	105.000.000,00	105	110.000.000,00	105	110.000.000,00			
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					316.000.000,00		427.000.000,00		538.000.000,00		649.000.000,00		760.000.000,00			
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	70	71	72	316.000.000,00	73	427.000.000,00	76	538.000.000,00	77	649.000.000,00	80	760.000.000,00	1.06.0.000.0.00.01.000 - DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG		

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional					316.000.000,00		427.000.000,00		538.000.000,00		649.000.000,00		760.000.000,00			
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	1	1	316.000.000,00	1	427.000.000,00	1	538.000.000,00	1	649.000.000,00	1	760.000.000,00			
	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan	43	43	43		43		43		43						
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	1	1		1		1		1						
1.06.07.2.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional					200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00		Bram Itam	
Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	1	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	400.000.000,00	1	500.000.000,00	1	600.000.000,00			
1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		Bram Itam	
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan	43	43	43	80.000.000,00	43	90.000.000,00	43	100.000.000,00	43	110.000.000,00	43	120.000.000,00			
1.06.07.2.01.0003 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					36.000.000,00		37.000.000,00		38.000.000,00		39.000.000,00		40.000.000,00		Bram Itam	
Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	1	1	36.000.000,00	1	37.000.000,00	1	38.000.000,00	1	39.000.000,00	1	40.000.000,00			

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Perioritas Pemerintah daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun sejumlah sub kegiatan prioritas yang diarahkan untuk menjawab isu-isu strategis daerah dan mendorong peningkatan kinerja pembangunan di sektor unggulan. Sub kegiatan prioritas ini tidak hanya bersifat operasional, tetapi merupakan bagian integral dari strategi pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Pemilihan Sub Kegiatan prioritas dilakukan melalui proses identifikasi terhadap kebutuhan Masyarakat dan serta evaluasi terhadap capaian pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Sub Kegiatan tersebut mencakup antara lain: Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Penyediaana Alat Bantu yang diperuntukkan bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia serta Sub Kegiatan Makanan dan Sandang bagi Korban bencana alam dan non alam. Sub kegiatan tersebut juga masuk dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.

Disamping itu juga terdapat Sub Kegiatan Pengeloaam Data Fakir Miskin Dimana kegiatannya terkait dengan Ferivikasi dan Validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan Data yang Valid Bantuan Sosial dapat tepat sasaran.

Program/Kegiatan dan sub kegiatan yang masuk dalam kategori prioritas didesain untuk mendukung secara langsung pencapaian outcome dari program prioritas daerah, diarahkan untuk menghasilkan output yang konkret dan terukur, serta dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran yang berjalan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pendanaan.

Dengan pelaksanaan kegiatan prioritas secara konsisten dan berkesinambungan, diharapkan kinerja perangkat daerah tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan Sosial masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam menjabarkan kebijakan kepala daerah ke dalam aksi nyata di lapangan, sesuai dengan pendekatan perencanaan berbasis hasil (result-based planning) dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan prioritas untuk program prioritas Pemerintah Daerah pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT				
1.	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial	1.06.02.2.01 - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 1.06.02.2.01.0005 - Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT 1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.02.2.03.0010 - Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan 1.06.02.2.03.0016 - Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	
2.	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan 1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang 1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	

			1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
			1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
			1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan	
			1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
			1.06.04.2.02.0013 - Pemberian Layanan Rujukan	
			1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
3.	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
			1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
			1.06.05.2.01.0002 - Rujukan Anak-Anak Terlantar	
			1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
4.	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
			1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	
			1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
			1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
			1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan instrumen penting dalam sistem manajemen kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana capaian tujuan dan sasaran strategis suatu perangkat daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, IKU berperan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk urusan di bidang Sosial. Penetapan IKU dilakukan berdasarkan prinsip SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), sehingga indikator yang ditetapkan benar-benar menggambarkan kinerja yang dapat diukur secara objektif.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), IKU menjadi elemen penghubung antara visi-misi kepala daerah dan pelaksanaan program secara teknis di tingkat perangkat daerah. IKU memuat indikator pada level outcome, yang mencerminkan hasil langsung dari pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjadi dasar dalam menyusun Perjanjian Kinerja (PK) antara kepala perangkat daerah dengan kepala daerah. Oleh karena itu, keberadaan IKU tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja dan pencapaian target pembangunan daerah.

Selain itu, untuk memberikan arah yang jelas dan konsisten terhadap pencapaian kinerja, setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) juga dilengkapi dengan target capaian yang ditetapkan untuk lima tahun ke depan. Penetapan target jangka menengah ini bertujuan agar perangkat daerah memiliki gambaran yang terukur dan terarah mengenai progres yang harus dicapai dalam periode RPJMD. Target lima tahunan ini tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian secara kumulatif, tetapi juga menjadi dasar untuk mengevaluasi kemajuan tahunan serta melakukan penyesuaian strategi apabila diperlukan.

Dengan adanya target jangka menengah yang jelas, perencanaan program dan kegiatan dapat diarahkan secara lebih fokus untuk mencapai outcome yang signifikan dan berdampak nyata bagi masyarakat. Target-target tersebut disusun dengan mempertimbangkan potensi sumber daya, kapasitas pelaksanaan, serta dinamika lingkungan strategis di bidang Sosial. Seluruh proses penetapan target ini mengedepankan prinsip keterlibatan stakeholder dan analisis data yang komprehensif, sehingga target yang dihasilkan tidak hanya ambisius, namun juga realistis dan dapat dicapai.

Dengan demikian, IKU dan target jangka menengah lima tahunan menjadi fondasi utama dalam mengarahkan perencanaan dan penganggaran berbasis hasil (result-based planning), serta menjadi alat pengendalian manajemen kinerja yang efektif. Keberadaan IKU

juga mendorong perangkat daerah untuk lebih fokus pada hasil, bukan hanya pada serapan anggaran atau keluaran administratif. Melalui sistem pengukuran kinerja yang kuat dan terstandarisasi, Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong efisiensi penggunaan anggaran, dan mempercepat tercapainya sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan demikian, IKU beserta target lima tahunan ini memperkuat akuntabilitas, sinergi antar OPD, dan akselerasi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara menyeluruh, dimana dapat digambarkan sebagai berikut:

TABEL 4.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menerima bantuan rehabilitasi Sosial	%	24	25	25	26	26	27	27	
2.	Persentase Keluarga Miskin dan rentan yang menerima bantuan tepat sasaran	%	48	48	49	50	51	52	53	
3	Nilai AKIP OPD	Angka	73	74	75	76	77	78	79	
4	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	82	82	83	84	85	86	87	

4.5 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran utama yang digunakan untuk menilai pencapaian output dari setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung program dan sasaran strategis perangkat daerah. IKK menggambarkan capaian kinerja paling penting berfokus pada hasil langsung yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan, sehingga menjadi tolok ukur keberhasilan operasional yang lebih spesifik dibandingkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur outcome pada tingkat program.

Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, setiap kegiatan harus memiliki IKK yang jelas dan terukur agar kinerja dapat dipantau secara efektif. Penetapan IKK ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dijalankan menghasilkan output yang sesuai dengan rencana dan mendukung pencapaian tujuan strategis.

Selain itu, untuk memberikan arah yang terukur dan berkelanjutan, setiap IKK juga dilengkapi dengan target capaian yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya mengikuti periode perencanaan lima tahunan sesuai RPJMD. Target ini berfungsi sebagai ukuran capaian output kumulatif yang harus dicapai dalam periode tersebut, sehingga memungkinkan perangkat daerah untuk melakukan evaluasi berkala dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Target lima tahunan IKK juga membantu dalam pengalokasian sumber daya dan perencanaan kegiatan secara lebih tepat sasaran, serta menjamin bahwa hasil kegiatan dapat memberikan dampak yang maksimal sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Dengan adanya IKK beserta target jangka menengah ini, pengelolaan kinerja di tingkat kegiatan menjadi lebih sistematis dan transparan. Hal ini juga memungkinkan perangkat daerah untuk mengidentifikasi kendala dan peluang dalam pelaksanaan kegiatan, serta melakukan penyesuaian strategi secara cepat dan tepat. Pada akhirnya, penerapan IKK yang didukung dengan target terukur akan memperkuat akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai visi dan misi pembangunan.

Berikut Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana berikut:

TABEL 4.5
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggapdarurat bencana daerah kabupaten	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar Panti	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun sebagai dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, tujuan strategis, sasaran, serta program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan bentuk tanggung jawab perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, adaptif, dan terukur di bidang Sosial. Penyusunan Renstra ini dilandaskan pada visi dan misi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, serta memperhatikan berbagai dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang berkembang secara lokal maupun nasional.

Sebagai perangkat daerah yang menangani Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang berdampak langsung pada peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) jangka menengah yang bersifat dinamis terhadap perubahan sesuai perkembangan..

Renstra ini juga memuat sistem manajemen kinerja berbasis hasil (result-based planning) melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dilengkapi dengan target capaian tahunan dan lima tahunan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan tidak hanya dilaksanakan secara administratif, tetapi juga menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan social masyarakat dan kemajuan daerah. IKU dan IKK menjadi alat ukur dalam pelaporan kinerja, bahan evaluasi berkala, serta dasar dalam pengambilan kebijakan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik. Pengelolaan kinerja yang baik juga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan efisien.

Sebagai penutup, Renstra ini bukan hanya menjadi dokumen perencanaan, melainkan juga representasi dari tekad dan komitmen Dinas Sosial untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu “Berkah Madani” sebuah visi yang mencerminkan harapan

akan daerah yang Berkualitas, Ekonomi maju, Religius, Kompetitif, Aman, dan Harmonis, serta Mandiri dan Inovatif. Diharapkan, seluruh program dan kebijakan yang tertuang dalam dokumen ini dapat menjadi instrumen perubahan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan dukungan semua pihak, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Renstra ini menjadi landasan untuk membangun masa depan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera dalam naungan keberkahan dan nilai-nilai kemadaniannya.

Kuala Tungkal, 19 September 2025

